



Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Value for Money

Muzdhalifah Tiara Putri Lamato¹, Wahyudin Hasan², Zubaidah Rahman³, Nikma Bilondatu⁴

¹²³⁴Universitas Gorontalo

Email: divalamato02@gmail.com

Keywords:

Value For Money;
Financial Performance

Abstract. *This study aims to analyze the financial performance of the Gorontalo Regency Government using a value-for-money approach. The research method employed is descriptive quantitative, with indicators of economy, efficiency, and effectiveness. The findings reveal that the regional government's financial performance is categorized as economical, indicating relatively prudent budget management. However, efficiency performance remains suboptimal, as resource utilization has not been proportionate to the outcomes achieved. Moreover, effectiveness is classified as ineffective, reflecting a gap between budget realization and the attainment of government program objectives. These conditions suggest the need for improved resource management and the optimization of program target achievements within the regional government.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan menggunakan pendekatan *value for money*. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan indikator ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah tergolong ekonomis, menandakan pengelolaan anggaran yang relatif hemat. Namun, kinerja efisiensi belum optimal, dengan penggunaan sumber daya yang belum proporsional terhadap hasil yang dicapai. Selain itu, efektivitas kinerja juga tergolong tidak efektif, menunjukkan adanya kesenjangan antara realisasi anggaran dan pencapaian tujuan program pemerintah. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan pengelolaan sumber daya dan optimalisasi pencapaian target program pemerintah daerah.

Corresponden author:

Email: divalamato02@gmail.com

Pendahuluan

Dalam era modern tata kelola pemerintahan, pemerintah sebagai perencana sekaligus pelaksana kebijakan anggaran, baik APBN maupun APBD, dituntut untuk semakin transparan dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pembangunan. Salah satu wujud akuntabilitas tersebut adalah penyediaan informasi keuangan yang jelas bagi masyarakat, termasuk informasi mengenai keuangan daerah. Di sisi lain, kemajuan teknologi informasi memberi peluang besar agar masyarakat dan pemangku kepentingan dapat mengakses, mengelola, dan memanfaatkan data keuangan secara cepat dan akurat, sehingga mendukung terciptanya pemerintahan yang terbuka, responsif, dan adaptif terhadap perubahan.

Sebagai entitas publik, pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, penerapan tata kelola keuangan yang baik (*good governance*) sangat penting, khususnya dalam memastikan pengelolaan anggaran yang efisien, efektif, dan ekonomis. Otonomi daerah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya sendiri, sehingga kinerja keuangan daerah sering dievaluasi melalui indikator seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi belanja, dan rasio-rasio *value for money* yang mencakup aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan pentingnya *value for money* sebagai instrumen evaluasi kinerja sektor publik. Penelitian yang dilakukan oleh Erika dan Arnida (2023) menemukan bahwa penerapan *value for money* mampu menunjukkan tingkat ekonomis dan efisiensi yang baik pada pengelolaan APBD. Selanjutnya, Novita Sari et al. (2022) mengungkapkan bahwa kinerja keuangan instansi publik dapat bervariasi dari sisi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas ketika diukur dengan pendekatan *value for money*. Sementara itu, Prasetia et al. (2022) menunjukkan adanya peningkatan rasio ekonomi serta fluktuasi efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan menggunakan pendekatan *value for money*, yang difokuskan pada pengukuran aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran daerah.

Metode

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan *value for money* yang meliputi tiga indikator, yaitu tingkat ekonomis, tingkat efisiensi, dan tingkat efektivitas (Ferina & Arista, 2013). Tingkat ekonomis digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu menghemat pengeluaran. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan realisasi pengeluaran terhadap anggaran pengeluaran, kemudian dikalikan 100 persen. Hasil perhitungan menunjukkan kondisi apakah pengeluaran pemerintah tergolong ekonomis, berimbang, atau tidak ekonomis. Tingkat efisiensi digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah dalam memanfaatkan input untuk menghasilkan output sektor publik. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan realisasi belanja terhadap realisasi pendapatan, lalu dikalikan 100 persen. Rasio yang diperoleh dapat mengindikasikan apakah kinerja pemerintah daerah berada dalam kondisi efisien, berimbang, atau tidak efisien. Sementara itu, tingkat efektivitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana output yang dicapai pemerintah sesuai dengan target penerimaan yang telah ditetapkan. Indikator ini dihitung melalui perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan, kemudian dikalikan 100 persen. Hasil analisis menunjukkan apakah realisasi penerimaan daerah dapat dikategorikan efektif, berimbang, atau tidak efektif. Dengan menggunakan ketiga indikator tersebut, penelitian ini berupaya memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam perspektif *value for money*.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil Rasio Ekonomis

Kegiatan operasional dianggap ekonomis apabila mampu mengurangi atau sampai menghilangkan biaya-biaya yang tidak diperlukan. Semakin rendah rasio ekonomis, semakin baik kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Tabel 1. Rasio Ekonomis Pemerintah Kabupaten Gorontalo

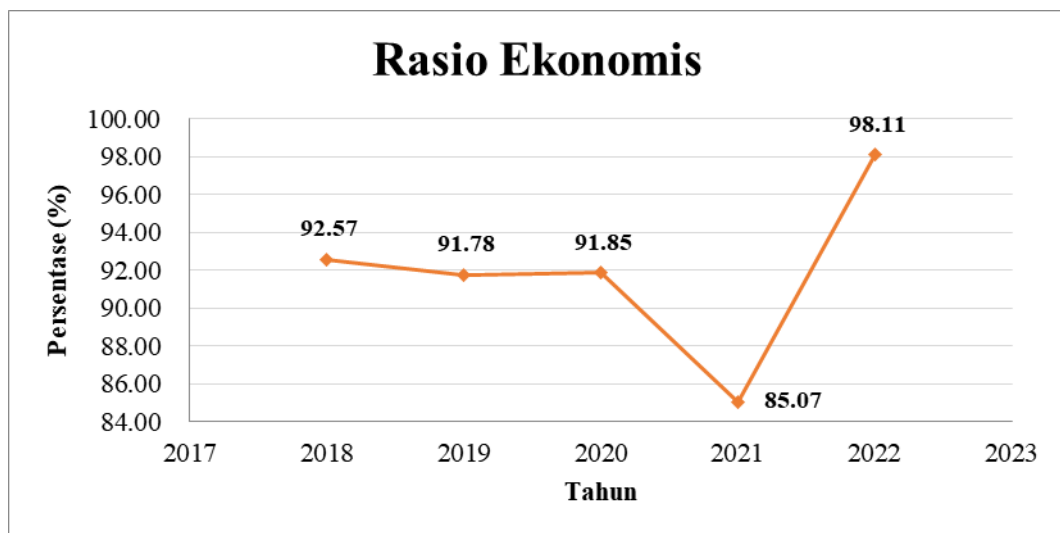
Tahun	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Persentase (%)
2018	1,451,790,060,201.70	1,568,234,316,917.90	92.57
2019	1,253,148,698,025.48	1,365,421,889,638.00	91.78
2020	1,392,206,507,241.16	1,515,696,646,369.40	91.85
2021	1,541,309,144,839.65	1,811,819,904,596.79	85.07
2022	1,475,435,901,270.04	1,503,882,283,702.00	98.11

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 1., Rasio ekonomis Pemerintah Kabupaten Gorontalo selama 5 tahun dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2018, rasio ekonomis memiliki nilai 92.57%, yang masuk dalam kategori ekonomis karena < 100%.
2. Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 91.78%, tetap termasuk dalam kategori ekonomis karena < 100%.
3. Pada tahun 2020, rasio ekonomis naik sedikit 91.85%, juga termasuk dalam kategori ekonomis < 100%.
4. Tahun 2021 menunjukkan rasio ekonomis tetap sebesar 85.07%, masih masuk dalam kategori ekonomis karena < 100%.
5. Pada tahun 2022, rasio ekonomis kembali meningkat menjadi 98.11%, yang tetap termasuk dalam kategori ekonomis karena < 100%

Rasio ekonomis sering dianggap sebagai indikator penghematan yang merangkul pengurusan yang ketat dan upaya untuk menghindari inefisiensi atau pemborosan. Semakin bagus kinerja keuangan pemerintah daerah ditunjukkan dengan semakin kecil nilai rasio ekonomis (Mahsun, 2006 : 179). Berikut adalah perkembangan kinerja value for money untuk rasio ekonomis dalam bentuk grafik dari tahun 2018 hingga 2022:



Gambar 1. Perkembangan Rasio Ekonomis

Perkembangan rasio ekonomis pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, seperti yang tergambar pada Gambar 5.1, menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Dari tahun anggaran 2018 hingga 2019, terjadi penurunan sebesar 0,79%. Kemudian, dari tahun 2019 hingga 2020, terjadi kenaikan sebesar 0,07%. Selanjutnya, dari tahun 2020 hingga 2021, terjadi penurunan yang cukup besar, yakni sebesar 6,78%. Namun, dari tahun anggaran 2021 hingga 2022, terjadi kenaikan sebesar 13,04%. Pada tahun 2022, persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mengindikasikan adanya peningkatan

pengeluaran oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo pada tahun tersebut. Secara umum, peningkatan realisasi anggaran cenderung terjadi pada penggunaan belanja operasional, yang mencakup berbagai hal seperti belanja bantuan sosial, belanja pegawai, belanja subsidi, belanja bunga, belanja hibah, belanja barang dan jasa, dan belanja bantuan keuangan.

Hasil Rasio Efisiensi

Pencapaian output yang optimal dengan penggunaan input minimal atau mencapai hasil tertentu dengan menggunakan sumber daya seefisien mungkin menjadi rujukan tingkat efisiensi dari kinerja keuangan. Jika rasio yang diperoleh tidak melampaui 100%, maka kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo dianggap efisien. Semakin bagus kinerja pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo ditunjukkan dengan semakin rendahnya nilai rasio efisiensi.

Tabel 2. Rasio Efisiensi Pemintah Kabupaten Gorontalo

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Persentase (%)
2018	1,451,790,060,201.70	1,457,052,397,138.49	99.64
2019	1,253,148,698,025.48	1,283,181,447,340.00	97.66
2020	1,392,206,507,241.16	1,408,590,213,911.88	98.84
2021	1,541,309,144,839.65	1,351,193,921,844.92	114.07
2022	1,475,435,901,270.04	1,255,100,044,662.64	117.56

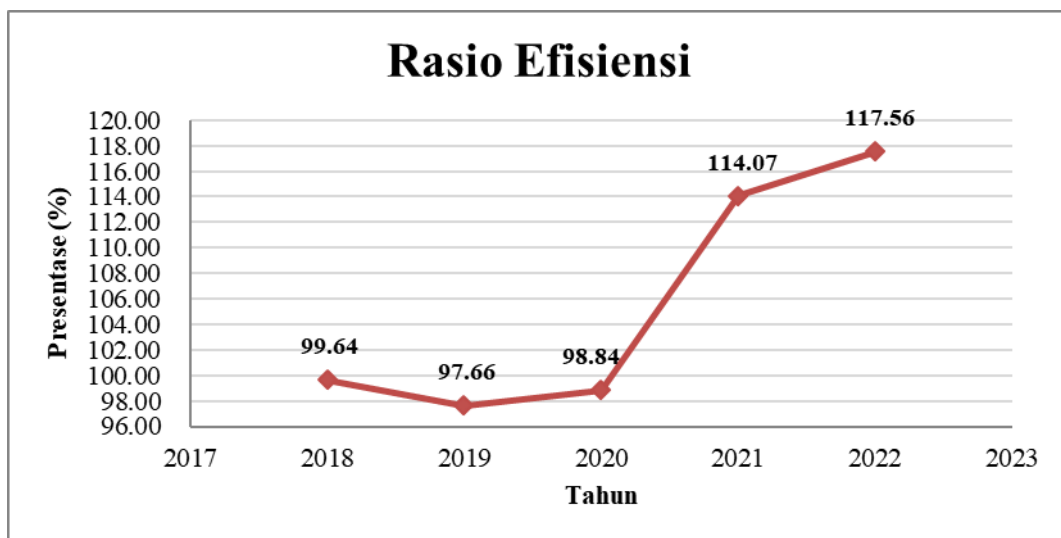
Sumber: Data diolah

Ditinjau dari tabel 2, hasil pengukuran Rasio efisiensi pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang diukur dari tahun 2018-2022, menunjukkan:

1. Pada tahun 2018, rasio efisiensi mencapai 99,64%, masuk dalam kategori efisien karena persentasenya <100%.
2. Pada tahun 2019 mengalami penurunan rasio efisiensi menjadi 97,66%, tetap dalam kategori efisien karena persentasenya <100%.
3. Pada tahun 2020, rasio efisiensi meningkat menjadi 98,84%, yang tetap dalam kategori efisien karena persentasenya <100%.
4. Tahun 2021 menunjukkan peningkatan rasio efisiensi menjadi 114,07%, masuk dalam kategori yang tidak efisien disebabkan persentasenya >100%.
5. Pada tahun 2022, rasio efisiensi kembali meningkat menjadi 117,56%, termasuk dalam kategori tidak efisien karena persentasenya >100%

Persentase rasio efisiensi tertinggi terdapat pada tahun 2021 dan 2022, yang menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Gorontalo belum efisien selama periode 2018-2022.

Grafik perkembangan kinerja Value for Money untuk rasio efisiensi dari tahun 2018-2022 pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo sebagai berikut :



Gambar 2. Perkembangan Rasio Efisiensi

Berdasarkan gambar 2, rasio efisiensi dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami variasi. Pada tahun 2018 hingga 2019, mengalami penurunan sebesar 1,98%, namun masih berada dalam kategori efisien. Dari tahun 2019 ke 2020, mengalami kenaikan sebesar 1,18%, tetapi tetap dalam kategori efisien meskipun mendekati nilai 100%. Pada periode 2020 hingga 2021, terjadi kenaikan signifikan sebesar 15,21%, sehingga masuk dalam kategori tidak efisien. Selanjutnya, dari tahun 2021 hingga 2022, terjadi kenaikan sebesar 3,49%, tetapi masuk pada kategori yang tidak efisien.

Dari analisis rasio efisiensi, bisa dievaluasi sejauh mana penggunaan belanja daerah untuk mengoptimalkan pendapatan Kabupaten Gorontalo. Pengukuran rasio efisiensi bertujuan untuk menilai seberapa tinggi belanja daerah yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Selama periode 2018-2022, Pemerintah Kabupaten Gorontalo tidak berhasil memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien untuk mencapai target yang ditentukan. Meskipun pemerintah daerah berhasil menciptakan anggaran belanja yang sesuai target, pencapaian tersebut menjadi kurang berarti jika biaya yang dimanfaatkan untuk menciptakan anggaran belanja lebih tinggi dibandingkan pendapatan yang diperoleh.

Hasil Rasio Efektivitas

Ukuran yang menunjukkan seberapa sukses output program dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan merupakan istilah dari efektivitas. Semakin efektif proses kerja suatu bagian organisasi ditunjukkan oleh semakin besar output yang diperoleh dalam menggapai tujuan yang telah ditetapkan. Perhitungan efektivitas mengacu pada korelasi antara pengeluaran (output) dengan target yang telah ditetapkan. Namun, Efektivitas tidak mencerminkan seberapa tinggi biaya yang dibutuhkan untuk menggapai target tersebut. Selain itu, efektivitas bisa didefinisikan sebagai variabel keberhasilan suatu organisasi dalam menggapai targetnya. Jika sebuah organisasi berhasil menggapai targetnya, maka itu menandakan bahwa organisasi tersebut telah beroperasi secara efektif (Ulum, 2004 : 294). Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dianggap efektif jika perbandingan yang tercatat atau tercapai melebihi 100%. Semakin baik kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo ditunjukkan dengan semakin besar nilai rasio efektivitas.

Tabel 3. Rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten Gorontalo

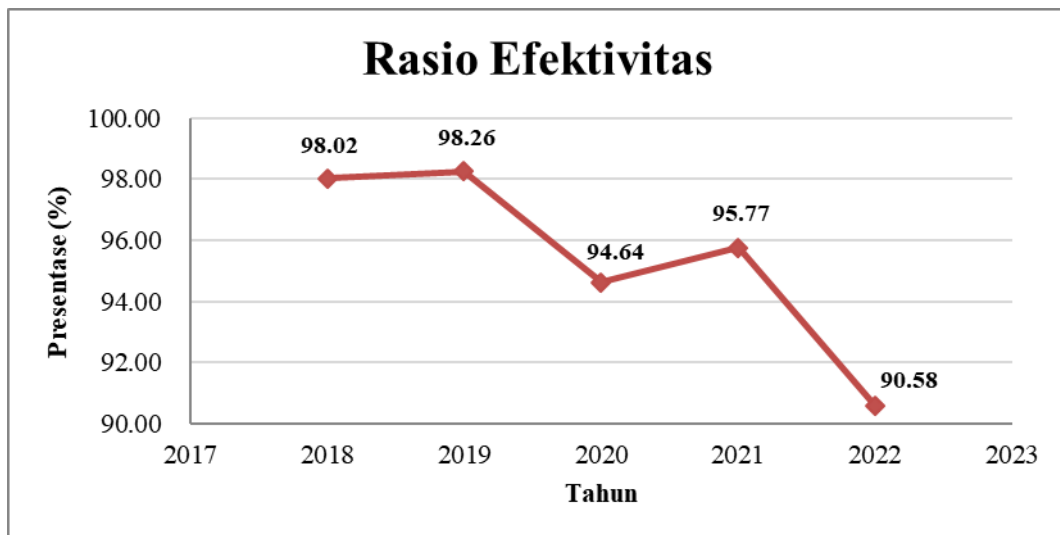
Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	Persentase (%)
2018	1,457,052,397,138.49	1,486,458,966,923.00	98.02
2019	1,283,181,447,340.00	1,305,896,687,350.00	98.26
2020	1,408,590,213,911.88	1,488,426,104,548.40	94.64
2021	1,351,193,921,844.92	1,410,927,542,457.00	95.77
2022	1,255,100,044,662.64	1,385,654,283,702.00	90.58

Sumber: Data diolah

Ditinjau dari tabel 3., untuk Rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang dari tahun 2018 hingga 2022, menunjukkan :

1. Pada tahun 2018, rasio efektivitas mencapai 98.02%, yang masuk dalam kategori tidak efektif karena memiliki persentase <100%.
2. Tahun 2019 menunjukkan sedikit kenaikan rasio efektivitas menjadi 98.26%, tetap termasuk dalam kategori tidak efektif karena memiliki persentase <100%.
3. Pada tahun 2020, rasio efektivitas kembali turun menjadi 94.64%, juga masuk dalam kategori tidak efektif karena memiliki persentase <100%.
4. Tahun 2021 terjadi peningkatan rasio efektivitas menjadi 95.77%, tapi tetap termasuk dalam kategori tidak efektif karena memiliki persentase <100%.
5. Untuk tahun 2022, rasio efektivitas mengalami penurunan yang cukup besar menjadi 90.58%, masih termasuk dalam kategori tidak efektif karena memiliki persentase <100%.

Perkembangan kinerja keuangan Value for Money untuk rasio efektivitas dari tahun 2018-2022 dalam bentuk grafik sebagai berikut :



Gambar 3. Perkembangan Rasio Efektivitas

Berdasarkan gambar 3, terlihat adanya fluktuasi dalam rasio efektivitas dari tahun ke tahun. Pada rentang tahun anggaran 2018 hingga 2019, terdapat peningkatan kecil sebesar 0,24%. Namun, pada periode tahun 2019 hingga 2020, terjadi penurunan signifikan sebesar 3,62%. Selanjutnya, dari tahun 2020 hingga 2021, terjadi kenaikan sebesar 1,13%. Namun, pada tahun 2021 hingga 2022, terjadi penurunan yang cukup besar sebesar 5,19%. Tahun anggaran 2018 menonjol sebagai tahun terbaik dengan rasio efektivitas mencapai 98,26%, hampir mencapai kategori cukup efektif karena nilainya cukup mendekati 100%.

Keberhasilan pemerintah daerah diukur dengan kemampuannya untuk mewujudkan realisasi pendapatan yang melebihi target yang telah ditetapkan, sementara pengeluaran belanja yang direalisasikan lebih sedikit daripada target belanja yang telah diterima.

Dapat disimpulkan bahwa selama periode 2018-2022, pengukuran kinerja keuangan pada rasio efektivitas menunjukkan kategori tidak efektif. Fenomena ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo belum mencapai kinerja optimal dalam melaksanakan program-programnya, meskipun realisasi anggaran mendekati target yang telah ditentukan. Masih terdapat ketidaksesuaian antara output yang didapatkan dengan sasaran yang sudah ditetapkan atau pencapaian tujuan.

Pembahasan

Data hasil pengukuran Value For Money dengan indikator tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Gorontalo dari tahun 2018 hingga 2022 sebagai berikut:

Tabel 4. Pengukuran indikator Value for Money pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gorontalo tahun 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Ekonomis	92.57%	91.78%	91.85%	85.07%	98.11%
Kategori	Ekonomis	Ekonomis	Ekonomis	Ekonomis	Ekonomis
Rasio Efisiensi	99.64%	97.66%	98.84%	114.07%	117.56%
Kategori	Efisien	Efisien	Efisien	Tidak Efisien	Tidak Efisien
Rasio efektivitas	98.02%	98.26%	94.64%	95.77%	90.58%
Kategori	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif

Secara keseluruhan, rasio ekonomis Pemerintah Kabupaten Gorontalo selama periode lima tahun (2018-2022) termasuk dalam kategori ekonomis. Pada tahun 2018, rasio ekonomis sebesar 92,57%. Di tahun 2019, rasio ekonomis sedikit menurun menjadi 91,78%, tetapi tetap tergolong kategori ekonomis. Pada tahun 2020, rasio ekonomis mencapai 91,85% dan juga masih dalam kategori ekonomis. Tahun 2021, rasio ekonomis turun dan memperoleh nilai sebesar 85,07%, namun tetap berada dalam kategori ekonomis. Terakhir, di tahun 2022, rasio ekonomis meningkat menjadi 98,11% dan tetap berada dalam kategori ekonomis.

Selama periode 2018-2022, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo menunjukkan rasio ekonomis rata-rata sebesar 91,88%, yang tergolong ekonomis. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah mampu mengelola anggarannya secara efisien. Evaluasi ekonomi ini bertujuan untuk menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Gorontalo selama periode 2018-2022 dalam mengakses dan mengatur sumber daya (input) yang diperlukan, sambil mengantisipasi pengeluaran yang tidak produktif dan tidak bersifat hemat. Tingkat ekonomis suatu aktivitas bukan hanya diukur dari ketidakborosan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo, tetapi juga tetap mengkaji hasil (output) yang dicapai. Penghematan akan kurang berarti jika hasil (output) yang diperoleh tidak memenuhi tujuan atau tidak bisa dicapai secara optimal. Ekonomis berkaitan dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk mengubah input primer, seperti dana anggaran, menjadi pemasukan sekunder, seperti tenaga kerja, bahan baku, infrastruktur, dan barang modal yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas operasional organisasi, dengan cara yang tidak boros dan efektif serta pengelolaan keuangan yang tepat.

Selama periode lima tahun (2018-2022), rasio efisiensi Pemerintah Kabupaten Gorontalo menunjukkan variasi. Pada tahun 2018, rasio efisiensi mencapai 99,64%, yang diklasifikasikan sebagai efisien. Pada tahun 2019, rasio efisiensi dengan nilai 97,66%, juga masuk dalam kategori efisien. Pada tahun 2020, rasio efisiensi mencapai 98,84%, tetap ada pada kategori efisien. Namun, pada tahun 2021, rasio efisiensi meningkat menjadi 114,07%, masuk dalam kategori yang tidak efisien, demikian juga pada tahun 2022 dengan rasio efisiensi dengan nilai 117,56%, juga masuk dalam kategori tidak efisien. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan penggunaan input yang tidak proporsional terhadap output yang dihasilkan, yang dapat mengindikasikan ketidaksempurnaan dalam pengelolaan sumber daya pada tahun-tahun tersebut.

Rasio Efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo selama periode 2014-2018 secara umum menghasilkan rata-rata dengan nilai 105,55%, yang tergolong dalam kategori tidak efisien. Hal ini disebabkan oleh pemborosan pada beberapa sektor, seperti pengeluaran untuk renovasi dan pengembangan fasilitas yang sudah memadai. Hal ini tercermin dari kenaikan anggaran belanja setiap tahunnya, serta dominasi belanja pegawai, seperti perjalanan dinas atau pengadaan kendaraan dinas baru. Perbandingan dari realisasi anggaran belanja dan pendapatan mencerminkan kurangnya efisiensi dalam pengelolaan keuangan, menunjukkan adanya pemborosan yang tidak mematuhi prinsip penghematan dan efisiensi anggaran daerah. Pencapaian target anggaran belanja seharusnya diiringi dengan pengeluaran yang seimbang dengan pendapatan yang diperoleh.

Rasio efektivitas pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo selama 5 tahun (2018-2022) menunjukkan variasi, dengan beberapa tahun mengalami kenaikan dan penurunan. Tahun 2018 hingga 2022, efektivitas ada pada kategori tidak efektif, dengan persentase yang bervariasi antara 90,58% hingga 98,26%. Rata-rata efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo selama periode 2014-2018 adalah 96,67%, yang juga termasuk dalam kategori tidak efektif. Fenomena ini menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo belum optimal dalam mencapai tujuan programnya, meskipun realisasi anggaran mendekati target yang ditetapkan. Terdapat ketidaksesuaian dari output yang didapatkan dengan target atau sasaran yang ditentukan, menunjukkan adanya ruang untuk peningkatan efektivitas program-program pemerintah daerah tersebut.

Pengukuran efektivitas adalah suatu rasio yang menunjukkan dampak atau hasil dari program dalam mencapai target yang telah ditentukan. Ini merupakan ukuran keberhasilan sebuah organisasi dalam menggapai tujuannya. Semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi ditunjukkan dengan semakin besar output yang didapatkan dalam mencapai target atau sasaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Gorontalo, meskipun realisasi anggaran hampir mencapai target yang ditetapkan, masih terdapat kesenjangan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau sasaran yang direncanakan. Salah satu contohnya adalah kurangnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Kurangnya alokasi dana dari pemerintah, khususnya dalam pembangunan layanan yang difokuskan pada penyandang disabilitas, menjadi salah satu faktor utama. Karena belum adanya peraturan daerah yang membuat kebijakan tentang penyediaan fasilitas untuk penyandang disabilitas, maka dana untuk membangun akses bagi mereka juga tidak menjadi prioritas dengan jumlah yang memadai (Hadi, 2019:143).

Efektivitas kinerja di Kabupaten Gorontalo belum mencapai tingkat yang sangat efektif karena realisasi anggarannya masih jauh dari target yang direncanakan. Adanya kegiatan yang ditetapkan tetapi tidak terealisasi mengakibatkan terjadinya perbedaan signifikan antara realisasi dan target anggaran.

Simpulan

Hasil penelitian menjelaskan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo belum memuaskan berdasarkan evaluasi rasio Value for Money. Selama periode 2018-2022, terjadi fluktuasi yang signifikan dalam kinerja, menandakan ketidakstabilan. Meskipun rasio ekonomis menunjukkan nilai yang secara umum masuk dalam kategori ekonomis, namun perubahan yang fluktuatif selama lima tahun menimbulkan keraguan. Efisiensi, dengan rata-rata rasio 105,55%, dikategorikan sebagai tidak efisien. Demikian juga, efektivitas dengan rata-rata rasio 96,67%, menunjukkan ketidakmampuan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Daftar Pustaka

- Hadi, I. (2019). Urgensi aksesibilitas disabilitas pada instansi pemerintahan Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Al-Himayah*, 3(2), 223–245.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran kinerja sektor publik*. BPFE.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terbaru). Andi.
- Maryanti, C. S., & Munandar, A. (2021). Analisis value for money untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya tahun anggaran 2015–2019. *Jurnal Ilmiah MEA*, 5(3), 2886–2899.
- Nurafifah, I. P. (2022). Dengan menggunakan pendekatan value for money (Studi kasus pada Kabupaten Nabire tahun 2019–2021). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis (Akuntansi)*, 2(2), 8–14.
- Pratama, V. Y., Syamsuddin, & Difa, F. (2022). Analisis pengukuran kinerja berbasis konsep value for money pada pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(2).
- Sampow, R., & Pangkey, R. (2023). Analisis kinerja keuangan dengan menggunakan metode value for money pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(2), 261–271.
- Suridiyanti, W. A., Haliah, & Nurleni. (2023). Analisis pengukuran kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan prinsip value for money periode tahun 2019–2021. *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer*.
- Triyassari, A., & Sambharakreshna, Y. (2023). Value for money dan rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan daerah: Studi pada BPKAD Kabupaten Nganjuk periode 2018–2022. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 1(1).
- Ulum, I. (2004). *Akuntansi sektor publik: Sebuah pengantar*. UMM Press.